

Diskusi FORCI Development
KONFLIK LAHAN: Tantangan Menuju Pengelolaan Hutan Lestari
Auditorium III Fahutan IPB, 10 Januari 2009

Narasumber: Yusup Napiri
Fasilitator: Agus Budi Wibowo

ABW:
Assalamualaikum wr.wb.,
Selamat pagi teman-teman semua..

Kita masih akan melanjutkan kedua topik yang kita diskusikan 2 minggu kemarin. Tentunya disini ada spirit yang ingin Forci letakkan. Bahwa disini tidak ada siapa yang lebih atau kurang dari yang lain. Disini ada ruang-ruang kosong yang kita bisa saling mengisi, bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita bisa membawakan spirit tadi. Saya melihat Mas Buyung jadi ingat diskusi kemarin, dimana Mas Buyung bilang bahwa, "Saya kan S1, belum tahu apa-apa" Pernyataan itu dikupas habis oleh Pak Sudarsono Soedomo yang mengatakan bahwa Profesor saja belum tentu benar, dan tahu segalanya. Tidak juga S1 itu lebih bodoh dari yang lain.

Ruang-ruang seperti ini yang ingin dilakukan oleh Forci, sehingga masing2 dari sini dapat berkontribusi untuk itu. Hari ini ada dua narasumber yang Forci hadirkan disini, yaitu Mas Yusup, yang akan mengantarkan diskusi kepada topik yang akan dijadikan sebagai pijakan diskusi. Bukan sesuatu yang akan disampaikan Mas Yusuf itu kebenaran yang absolut. Untuk membantu proses tadi, forci mengundang Mas Konar, yang kebetulan ruang studinya beliau di dalam konteks Reforma Agraria. mengambil studi tentang konflik. Mas konar akan membantu kita untuk melihat konflik dari perspektif yang lain, yg selama ini kita selalu membangun dari perspektif Forestri kita, dan mungkin kita sekarang dapat membahasnya dalam perspektif yang lain.

Saran saya, diskusi ini berjalan cair saja, bila memang perlu dapat diinterupsi. Kami tidak dengan sengaja men-set bahwa tidak ada dosen-dosen disini. Tetapi mereka berhalangan hadir saja. Kami ingin membawakan amanah dari Bapak Dekan, bahwa kenapa sih kita harus takut kepada dosen, wong dosen juga manusia...

YN:

Sebagaimana yang telah disampaikan Mas Agus, saya coba menyampaikan sebuah pengantar diskusi. Pada diskusi sebelumnya kita membahas sumberdaya alam dan konstitusi. Seperti yang kita ketahui pada pasal 33 UUD 45 dimana konstitusi sebagai landasan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan SDA, dimana pada ayat ke 3 nya menyatakan bahwa "Bumi air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. **"Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"** menjadi kata kunci penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh Negara. Pengetahuan ini penting

bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi PNS maupun swasta dalam mengambil kebijakan.

Setelah konstitusi UU Agraria 1870 dibuat oleh Belanda untuk melancarkan investasi mereka dalam perkebunan. Melahirkan banyak perkebunan-perkebunan besar di Jawa dan Sumatera. Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960.

UU lainnya tentang lahan antara lain

- UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- UU No. 11/1974 tentang Pengairan
- UU No. 9/1985 tentang Perikanan
- UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
- UU No. 5/1967 jo UU No. 41/1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan
- UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU No. 24/1992 jo UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang
- TAP-MPR no.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber-daya Alam

Sumberdaya alam saat ini pada prakteknya masih dikuasai oleh perorangan dalam bentuk perusahaan (perorangan yang besar). Hutan dikuasakan kepada HPH dan HTI. Hampir kita tidak punya hutan yang dikuasakan kepada petani. Kalau kita melihat ada hutan rakyat, tetapi tidak ada kepastian alokasi ruang regulasi bagi rakyat itu sendiri.

Kalau kita lihat, bentuk itu adalah bentukan yang dibuat oleh koperasi, bukan yang dibuat oleh swasta atau negara. Ada tumpang tindih antar ruang agraria. Kalau dilihat, itu ada perbedaan kepentingan antara sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, bahkan ada desa di dalam hutan. Kita memerlukan satu teknologi yang akan mengakhiri ketidakkonsistenan dalam tumpang tindih wilayah hutan itu. Sebenarnya wilayah hutan itu termasuk wilayah hutan ga sih, atau desa itu masuk wilayah hutan. Kalau kita melihat istilah-istilah di dalam tata ruang itu, memang yang paling relevan itu kehutanan. Yang pertama ingin membuat model implikasi dari tata ruang adalah orang kehutanan. Sampai disebutnya ada istilah kehutanan dan non-kehutanan, Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL). Mungkin kalau dulu yang menginisiasi tata ruang itu adalah orang pertanian, maka akan disebut pertanian dan non-pertanian.

Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan memberi arti bahwa belum tercapainya kemakmuran masyarakat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, apalagi dengan adanya kerusakan Sumber daya alam yang kita lihat sekarang ini.

Kemudian kita akan membahas masalah tenurial, ini saya mencoba mencari apa sih arti tenurial itu sendiri.

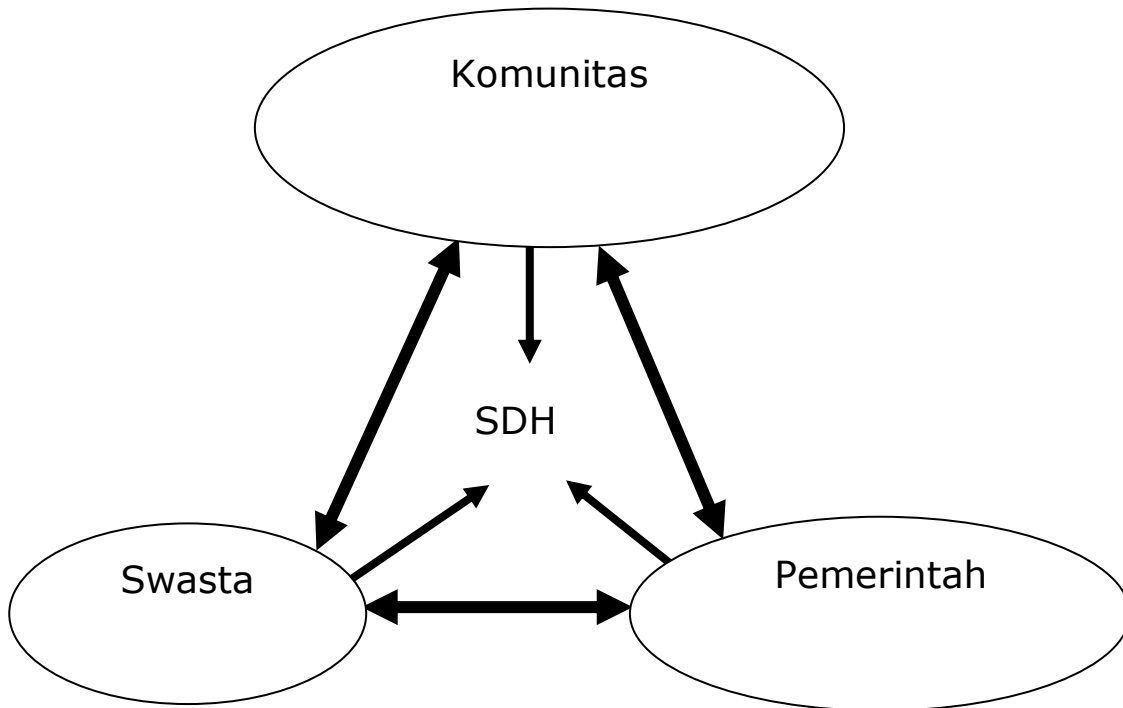
Kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa Latin *tenere* yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. Menurut Wiradi (1984), persoalan tenurial sumber daya hutan, tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas tanah dan segala tanam-tumbuh yang ada di atasnya. Ridell (1987) memaknai bahwa "*tenure system is a bundle of rights*" sejumlah hak untuk menguasai dan memanfaatkan, Konflik yang terjadi adalah konflik dalam pemilikan dan pemanfaatannya.

Sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak untuk memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya yang terdapat dalam suatu masyarakat yang secara bersamaan juga memunculkan sejumlah batasan-batasan tertentu dalam proses pemanfaatan itu.

Hak-hak tersebut dapat berupa hak milik atau hak sewa. Ketika masing-masing menghalangi hak orang lain, maka akan terjadi konflik.

Flowchart lingkup interaksi sosial pemanfaatan sumberdaya hutan..

Lingkup Interaksi sosial Pemanfaatan SDH



Bentuk kapitalis, sosialis, populis, menurut beberapa orang.....tidak ada bentuk yang steril

Contoh konflik di Kaltim ada dua bentuk konflik makro dan mikro, di tingkat makro. Perebutan ruang antar sektor TGHK tidak disepakati. konflik mikro. Ruang hidup komunitas dianggap tidak ada. Di tingkat komunitas, saya meneliti di Kutai Kartanegara...HPH ITCI (1978).....waktu masih HPH...masyarakat relatif hampir tidak ada konflik, masih OK...tapi ketika diubah menjadi HTI, mereka menjadi berubah. Hutannya tidak ada. Tidak bisa berburu lagi. Tanah yang akan digarap sudah tidak boleh lagi. Karena itu masyarakat merasa hutannya hilang, dan terjadilah konflik. Karena itu bagaimana kita harus saling memahami dan melengkapi. Saya mungkin itu pengantar dari dikusi.

ABW:

Mas Yusup sudah menjelaskan beberapa UU dan turunan2nya...juga sektor....pemahaman tenurial..sistem tenurial....konflik tenurial....kira2 temen2 mo memulai dari mana.....mungkin mba wita mo menjawab ini atau mo membahas yang lain....

Kita seringkali dihadapkan pada suatu kekacauan, spirit pasal 33 UUD 1945. Saat disitu diamanahkan bahwa bentuk usaha nya adalah koperasi disebut sebagai usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia saat ini, tapi nyatanya ga ada koperasi yang seperti itu. Tapi itu setahu saya, misalnya saja ada yang mengatakan, Mas Bagong, di PAPUA ada koperasi yang berjalan. Tetapi apakah seperti itu koperasi yang diamanahkan. Saya berharap temen-temen bisa memberikan referensi, silahkan

WITA:

Dari pengantar singkat Mas Yusup, tadi disebutkan ada masyarakat miskin di sekitar hutan. Apa ukuran miskin itu? Siapa yang membuat ukuran miskin tersebut? Tapi jika yang disebut masyarakat miskin itu enjoy dengan kehidupannya, bagaimana? Apakah itu yang disebut miskin? Ketika HPH diubah menjadi HTI, masyarakat kehilangan hutannya dan juga tempat peribadatannya. Misalnya saja ada hutan besar tempat mereka beribadah, harus hilang. Kita tidak bisa menganggap mereka hanya pencilan saja. Walaupun pencilan, mereka tetap harus diperhatikan.

Mario:

Menanggapi dan sedikit tanggapan mengenai masalah kepemilikan lahan, seperti dalam diskusi III, menurut saya pada saat diskusi tersebut, konflik lahan disebabkan belum adanya teknologi untuk itu memetakan lahan secara benar. Misalnya, di dalam peta itu tercatat adalah hutan primer, tetapi kenyataannya sudah menjadi pemukiman. Hal tersebut tidak bisa dilarang karena sudah menjadi perkebunan adanya demonstrasi dari masyarakat transmigrasi lahan transmigrasi menjadi perkebunan sedangkan SK nya sudah ada larinya ke pemerintah lagi ukuran orang miskin misalnya orang dayak di sana meramu mereka itu sjahtera ketika kebutuhan sudah diberlakukan hukum pasar dan bukan merupakan kebutuhan pokok maka mereka miskin teknologi spasial yang perlu diperkuat.

ABW:

Menurut Mas Mario, Permasalahannya kita ini guoblok banget saja. Tidak bisa menggunakan instrumen. Padahal jika kita menggunakan teknologi masalah seperti ini bisa saja diatasi.

Mustian:

Dari pemaparan tadi, masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Tapi sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Bagaimana bila kita berpikir dengan cara pandang pengusaha. Berpikir sebagai masyarakat berpikir sebagai pemerintah sehingga kita dapat mendapatkan ide untuk memecahkan masalah ini.

ABW:

Mas Mustian sudah mengajak kita untuk bertindak konkret dalam level berpikir sehingga kita dapat membuahkan solusi.

Elnino:

Klo kita lihat land use management yang terjadi di Indonesia kebanyakan masalah land use management. Masing-masing mengakui punya hak masyarakat cuma dijadikan objek masyarakat dikasih begitu banyak cap bodoh, miskin, primitif yang gontok2an ini sebenarnya kan pemerintah dengan baju yang berbeda masing2 punya wewenang dengan dasar yang berbeda-beda. Banyak kasus juga di tempat2 lain, banyak konflik lahan ini muncul bisa dibilang berawal dari *conflict of interest*. Kasus di halimun salak, parung. Menurut mas mustian, kita harus lihat dari kacamata yang mana? menurut saya, kita harus lihat dari kacamata pemerintah. Kalau ada yang tanya siapa sih yang disebut masyarakat miskin itu, ada jawabannya di pemerintah. Mumpung kita belum masuk ke pemerintahan, mari kita pertebal kacamata itu, agar bisa melihat lebih jelas. Kalo kita bilang pemerintah itu goblok, saya tidak setuju. Untuk menjadi PNS saja ada syarat IPK minimal 2,75. berarti tidak goblok dong. Menurut saya pemerintah itu buta. Dengan seragam yang dia pakai, mereka menjadi buta.

ABW:

Mas Nino mencoba melihat bahwa kayaknya di ruang pemerintah permasalahan itu terjadi. Ada komentar?

MYN:

Menurut saya yang paling penting dilakukan. Misalnya dari tulisan. Dari diskusi yang sudah dilakukan dapat dijadikan tulisan-tulisan. Coba deh belajar menulis.

Tahun '80 an orang melihat aqua, kok air saja dikuasai. Kemudian samapai dibuat undang-undangnya. Soal proses pemiskinan dari yang berkuasa dapat membuat undang-undangnya. Dalam proses pemiskinan ada proses peminggiran marginalitas.

Kemiskinan dapat terjadi karena bentuk ketergantungan. Seperti yang terjadi di Bantul kemarin, kondisinya mereka punya uang tetapi beras tidak ada. Jadi apa gunanya punya uang juga.

Teknologi terkadang sulit diakses oleh masyarakat. Ada temen2 LSM yang membantu, misalnya melalui pemetaan partisipatif. Nah, mahasiswa dari sekarang mulai belajar bagaimana agar nanti tidak melanggar amanat konstitusi tadi.

KONAR:

Saya juga ada pertanyaan nyambung dari pertanyaan2 sebelumnya saya ingin menanggapi komentar yang tadi menyatakan bahwa agak berantakan mengenai masalah kehutanan ini. MYN memancing kita untuk memikirkan hal tersebut, tadi juga ada yang bilang kita harus berpikir seperti apa? Apakah seperti pemerintah, masyarakat, atau pengusaha. Kenapa kita harus berpikir seperti itu mengapa kita tidak berpikir sebagai akademisi. Karena kalau kita berpikir seperti pemerintah dan pengusaha itu *blue print* nya sudah ada dan kita akan berputar disitu-situ saja, tidak akan berbeda jauh. Salah satu tanggung jawab akademisi memikirkan jalan keluar dari permasalahan ini dan berpikir *out of the box*. kita harus mencoba memikirkan secara berbeda dari pemikiran2 yang ada.

Tentang kemiskinan seperti yang tadi ditanyakan, saya tertarik dengan komentar bahwa jika kita mau bertanya kepada pemerintah itu sudah ada definisinya. Atau tadi ada yang komentar bahwa kemiskinan ada di kepala orang2 kota yang datang ke desa. Jadi kalau kita lihat orang yang celana nya agak rombeng, walau tanahnya ada lima hektar, kan kita ga tahu dia punya tanah lima hektar, juga disebut miskin. Konsep tentang kemiskinan itu selalu penting...apa yang mungkin terjadi..bila konsep kemiskinan itu jelas dan ternyata ada sekelompok orang miskin di sekitar kita. Kalau itu ada, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi.

Ini yang menjadi pertanyaan, knapa selalu dalam program2 besar itu selalu diperlukan kelompok-kelompok yang definisinya miskin? Plus kriteria-kriterianya, pangkatnya, apa untung nya ada indikator miskin? Siapa pihak yang diuntungkan dengan adanya indikator itu? Kita perlu kritis dalam menyikapi ini. Seperti tadi ajakan Mas Yusuf untuk memahami dan menyikapi konflik-konflik yang ada.

Kemudian satu soal lagi tadi mengenai komentar tentang kita harus ada di posisi mana, kita harus ada di posisi pemerintah, karena pemerintah sebagai pengatur yang mengatur dan yang lain hanya menjalankan saja. Kalau ada konflik begini berarti pemerintahnya yang kacau. Tetapi saya pikir, mungkin dalam beberapa kasus memang seperti itu, tetapi itu mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat adat bilang, iya kami begini karena disuruh pemerintah. Kita juga mengabaikan bahwa sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan, lobi2 pengusaha matian2 dilakukan. Sehingga walau pemerintah menentukan, tetapi dia tidak sepenuhnya menentukan. Ada kekuatan-kekuatan lain yang ikut menentukan.

Melihat dari kaca mata manapun, yg penting kritis. Kecenderungan kebijakan ekonomi global adalah pemerintah jangan terlalu banyak berperan. Serahkan saja kepada rakyat. Katanya serahkan kepada rakyat tapi de facto serahkan kepada pengusaha. Itu beberapa komentar. Komentar itu juga ada kaitannya dengan peran akademisi

Tadi juga ada isu yang diangkat mengenai teknologi. Saya rasa banyak teman-teman yang sudah melihat langsung di dataran rendah, bagaimana konflik itu terjadi. Kalau melihat bagaimana konflik itu bisa terjadi, kita perlu bertanya-tanya, dulu teknologi tidak ada tetapi tidak ada persoalan yang berarti. Teknologi bukan hanya berarti teknik menanam, tetapi juga pranata-pranata yang menopangnya. Yang akan menciptakan *conflic of interest*. Kalau sudah membicarakan itu berarti kan sudah tidak membicarakan hal teknis lagi, sudah waktunya akademisi memikirkan bahwa soal2 kehutanan ini yang bukan hanya dari kaca mata teknis kehutanan lagi. Kita mengharapkan mahasiswa kita yang nantinya akan menjadi pengambil keputusan di masa depan, dapat berpikir lain dari kita. Perlu membangun terobosan, tetapi kalau kita mau menerobos mikirnya ga boleh sama dengan seniornya. Mungkin itu saja.

ABW:

Ada yang menarik dari mas konar tadi..yg menjadi highlight saya...yuk kita OUT OF THE BOX berpikirlnya.....di kompas..yg selama ini yang saya pahami..perguruan tinggi (akademisi) ini dengan stereotype nya merupakan menara gading...di mana ruang manfaatnya kurang dirasakan.....menurut tulisan itu....perguruan tinggi sudah menjadi

bias sekali.....tidak ada lagi objektifitas dari suatu pengetahuan yang dipakai untuk keberpihakan yang jelas....bias pada politik, uang, dll...apakah nanti ruang2 privilege ini akan.....spiritnya mas konar tadi...keluar dari kerangka pikirnya..dan hal itu diemban oleh FORCI saat ini....FORCI sendiri sedang menguji hal tersebut...

ELNINO:

Menarik sekali pernyataan dari Mas Konar.....misalnya razia motor.....saya kurang setuju dengan istilah kemiskinan..saya lebih setuju dengan istilah pemiskinan.....gimana sih kaum akademisi ini dapat berperan dan bermanfaat bagi masyarakat.....

BAYU:

Luar biasa menarik.....ketika berbicara tentang posisi.....mindset generasi sudah diset untuk menjadi birokrat atau teknokrat.....pendidikan..

Kedua..kemiskinan...relativitas.....atas dasar apa kita menilai mereka miskin.....dari kacamata kapitalis....

Ketiga...konflik lahan...kepastian hukum....tarik-menarik kepentingan.....

ABW:

.....ruang-ruang konkrit dalm bentuk tulisan.....didesiminasikan.....di ruang2 pencerahan ini.....1966.....1974....1978.....1998.....banyak temen2 yang berkatifitas lewat.....

HANGGA:

Tadi saya agak terbakar dari apa yang disampaikan oleh Mas Bayu....peran akademisi.....terdidik.....prof iswandi anas.....akademisi sudah punya peran cukup penting.....bargaining power kaum terdidik ini sampai di mana?.....radikal....soft tapi menusuk.....berdiri di atas kaki kita sendiri...dan saya sangat setuju peran akademisi sudah harus diubah mindsetnya....UUPA 1960..ada kata2 hukum agraria adalah hukum adat...ada suatu sisi yang tidak kasat mata yang kurang bisa dilihat oleh kacamata kita.....dan akademisi bisa bias akibat semangat2 tertentu...uang, kekuasaan.....itu mungkin bisa kita jadikan renungan bersama.....

KEMAL:

.....Untuk mengubah.....pendidikan kita hanya mengajarkan sains..bukan sosial...

KEMAL:

...terdidik....ada sekat latar belakang.....antara "tukang ojek" dengan masyarakat di sekitar hutan.....

MYN:

Tersangkut istilah-istilah.....berpikir out of the box...punya pendapat, kita harus....ini adalah bedanya yang pernah ikut kuliah.....mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan politik.....misalnya kita lihat 1998....bagaimana

memahami dan berpikir lebih kritis dan baik.....UUPA.....kaitannya dengan cara berpikir tadi,,,,.....pemerintah...blueprint...pengusaha.....ordernya ini ordernya sapa...

ABW:

RICARDO:

Saya sangat tertarik sekali dengan diskusi ini dan berharap semoga terusa berlanjut.....penelitian dan PKL di PAPUA, fakfak...masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha.....banyak sekali orang2 yang ahli di bidang pertanian..di Dinas kehutanan adalah orang-orang ekonomi.....

WENDa.

Saya pikir ini hanyalah satu sisi saja...pastinya kita diberikan kesempatan untuk mempelajari suatu ilmu.....banyak permasalahannya yang melingkupi kita.....pemerintah.....pengusaha-pengusaha.....penguasa-pengusaha...masyarakat..faktanya tergadaikan.....kontribusi kita sebagai mahasiswa....perubahan tidak bisa dengan sendirinya...pencerdasan2 kepada teman2 yang lain.....akan mudah ditunggangi oleh kepentingan tertentu.....berlanjut kepada independensi diri..tidak terprovokasi pada kondisi di sekitarnya.....bukti konkret usaha kita, diskusi saat ini mengakomodir pemikiran2 mahasiswa.....ingat, mahasiswa harus punya kerangka berpikir....man behind the gun.....

YAN PUGU:

...apa yang pemerintah buat...orang2 yang duduk di pemerintah..dulu juga sama seperti kita...aturan2 tersebut dibuat dari hasil kajian2 ilmiah.....penelitian2 sosial yang dilakukan orang2 kehutanan.....untuk memberikan masukan kepada pemerintah.....jangan sampai ada orang kehutanan....saya justru senang ada orang kehutanan yang kerja di Bank, asuransi...mengurangi musuh.....

ABW:

.....ternyata apa yang disampaikan oleh mas yusup ini benar2 merupakan pengantar.....ada 5 poin yang saya catat.....1) ternyata permasalahan yang kita alami ini bukan hanya permasalahan teknis, tetapi ternyata berada pada basis ekonomi, sosial, dan budaya,.....sehingga ada suatu peletaakan...2) Berpikir kritis....3) Knowledge Enrichment.....4) ,.....5).....

MAS KONAR:

...syaa pikir diskusi seperti ini penting....perubahan akan terjadi di generasi,.....di titik awal di mana kolonialisme itu terjadi.....siapa yang menguasai ilmu tentang pengelolaan sumberdaya alam, maka dia yang menguasainya.....demikian juga ilmu2 yang mengatur manusia,dia yang mengontrol...akademisi memiliki peran yang signifikan untuk menantang sistem kapitalistik.....

ABW:
...semoga bisa menginspiring.....
Thanks all.....